



## Konflik Politik dalam Kepengurusan Partai di Sumatera Barat

### Penulis:

Akmal Arianto<sup>1</sup>, Aidinil Zetra<sup>2</sup>, Rheinaldo Resta Fadhilah<sup>3</sup>

### Afiliasi:

Pascasarjana Universitas Andalas, Indonesia<sup>1 2 3</sup>

### Email:

[akmaljidan32@gmail.com](mailto:akmaljidan32@gmail.com)<sup>1</sup>, [aidinil@soc.unand.ac.id](mailto:aidinil@soc.unand.ac.id)<sup>2</sup>, [rheinaldo.resto043@gmail.com](mailto:rheinaldo.resto043@gmail.com)<sup>3</sup>



©2021 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License-(CC-BY-SA) (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>)

DOI : <https://doi.org/10.33701/jtpm.v1i1.1871>

### \*Penulis Korespondensi

Akmal Arianto  
Pascasarjana Universitas Andalas  
Email: [akmaljidan32@gmail.com](mailto:akmaljidan32@gmail.com)

Diterima: 04 Februari 2021

Direvisi: 08 Maret 2021

Publikasi Online: 30 Juni 2021

### Abstract

*This research discusses the political conflict in the management of the Regional Representative Council (DPD) of X Political Party in West Sumatera. This study aims to analyze the factors and implications of political conflicts that occur in the management of the Regional Representative Council (DPD) of X Political Party in West Sumatera. In this research, the researcher uses the definition of political conflict from Ramlan Surbakti that defines political conflict as opinion differences, competition and disagreement among a number of individuals, groups or organizations as an effort to obtain and maintain the sources of decisions made and implemented by the government. The method used in this research is a qualitative descriptive approach. The theory used in this research is the theory of the conflict-causing factors from Simon Fisher and the concept of political conflict from Ramlan Surbakti. From the research, it was found that there are some factors that caused the political conflicts. Firstly, there was a sense of distrust from the management of the Regional Leadership Council of X in West Sumatera towards SO. Secondly, the feeling of disappointment of the Chief of Regional Leadership Council of X in West Sumatera towards W's inability to take a firm stand regarding the conflicts that occurred in the management. Thirdly, the lack of mutual respect between senior and junior figures of X in West Sumatera. Fourthly, different opinions about party management occurred between SO's side and D's side. The political conflict in X has implications for the replacement of the chairman of the Regional Representative Council and the dismissal of 10 X members from the House of Regional Representatives in West Sumatera, who are on D's side, that caused the dismissed cadres chose to switch parties. The results show that the conflict management of the West Sumatra Hanura DPD is caused by the interest conflict of the power source between VM who received support from SO and the stronghold of MH who received support from D. Conflict is further exacerbated by the ego of M and MH's seniority that see VM as a young figure who has no experience in the party. This conflict surely has implications for public trust in the X Party, especially the board of the DPD X, West Sumatra.*

**Keywords:** *political conflict; political party; implication*

### Abstrak

Penelitian ini membahas tentang konflik politik dalam kepengurusan Partai X Sumatera Barat. Penelitian bertujuan menganalisis faktor-faktor penyebab dan implikasi konflik politik yang terjadi di kepengurusan Partai X Sumatera Barat. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan definisi konflik politik dari Ramlan Surbakti yang mendefinisikan konflik politik sebagai perbedaan pendapat, persaingan dan pertentangan di antara sejumlah individu, kelompok atau organisasi dalam upaya untuk mendapatkan dan mempertahankan sumber-sumber dari keputusan yang dibuat dan dilaksanakan pemerintah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif. Teori yang digunakan dalam penelitian yaitu teori faktor-faktor penyebab konflik dari Simon Fisher dan konsep konflik politik dari Ramlan Surbakti. Penelitian ini

menghasilkan beberapa simpulan terkait faktor penyebab konflik politik. *Pertama* adanya rasa ketidakpercayaan pengurus X Sumatera Barat terhadap SO. *Kedua* rasa kekecewaan ketua X kepada W yang tidak mampu mengambil sikap dengan tegas dalam konflik yang terjadi di kepengurusan. *Ketiga* kurangnya rasa saling menghargai antara tokoh senior dan junior X di Sumatera Barat. *Keempat* perbedaan pandangan dalam pengelolaan partai antara kubu SO dengan kubu D. Konflik politik di X memiliki implikasi terhadap pergantian ketua serta pemecatan 10 anggota dewan X Sumatera Barat dari kubu D, sehingga kader yang dipecat memilih untuk berpindah partai. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa konflik kepengurusan X Sumatera Barat disebabkan oleh benturan kepentingan sumber kewenangan antara pihak VM yang mendapatkan dukungan dari SO dengan kubu HM yang mendapat dukungan dari D. Konflik semakin diperuncing dengan ego senioritas M dan HM memandang VM sebagai tokoh muda yang belum berpengalaman dalam dunia kepartaian. Konflik ini tentu berimplikasi pada kepercayaan masyarakat terhadap Partai X terutama pengurus X Sumbar.

**Kata kunci:** konflik politik; partai; implikasi

## PENDAHULUAN

Di era reformasi, demokrasi kembali ditegakkan. Kebebasan berpendapat menemukan lagi momentumnya. Berbagai penghargaan diterima oleh pemerintah Indonesia dalam kaitan dengan kualitas demokrasi yang sedang berlangsung (Noor, 2016 : 1-17). Partai politik (Parpol) merupakan fenomena umum dalam kehidupan berdemokrasi dan keberadaannya memiliki arti yang sangat penting.

Partai politik sebagai prasyarat institusi demokrasi, diciptakan sebagai alat perjuangan nilai dan ideologi tertentu melalui struktur kekuasaan dan kekuasaan itu diperoleh melalui keikutsertaannya dalam pemilihan umum Sistem demokrasi tidak mungkin berjalan dengan baik tanpa adanya partai politik (Abu Bakar, 2013 :105-119).

Partai politik sebagai perantara yang menghubungkan kekuatan dan ideologi sosial dengan lembaga-lembaga pemerintahan yang resmi serta mengaitkannya dengan aksi politik yang lebih luas di dalam masyarakat dengan tujuan untuk memperoleh kekuasaan politik dengan cara konstitusional (Miriam Budiardjo, 2009 : 403).

Di negara yang tidak memiliki partai politik dapat disebut sebagai negara yang tidak memiliki sarana kelembagaan dalam suksesi kepemimpinan guna mendorong perubahan yang terus-menerus dan menyerap segala gejolak perubahan yang terjadi dalam masyarakat (Samuel P.Hungtinton, 1983 : 263). Partai memainkan peran penghubung yang sangat strategis di antara pemerintahan dengan warga

negara. Karena itu partai politik merupakan pilar dalam sistem politik yang demokratis (Schattschneider, 1975 : 8). Bahkan banyak yang mengatakan bahwa partai politiklah yang sebetulnya menentukan demokrasi (Yves Meny dan Andrew Knapp, 1968 : 7).

Dengan semakin kuatnya peran Parpol dalam kehidupan negara demokrasi, mulai timbul konflik-konflik dalam tubuh Parpol baik itu konflik sosial maupun konflik politik. Konflik adalah hubungan antara dua belah pihak atau lebih (individu atau kelompok) yang memiliki atau merasa memiliki sasaran-sasaran yang tidak sejalan (Simon Fisher, 2001 : 407).

Konflik politik di internal Parpol semakin meningkat, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Salah satu partai sedang dilanda permasalahan konflik yaitu Partai X. Konflik ini terjadi karna adanya perbedaan kepentingan antara ketua umum dan sekretaris jendral.

Konflik ini juga berimbas sampai pada kepengurusan X Sumbar. Ini dibuktikan dengan surat keputusan tersebut, SO atas nama pimpinan partai memecat M dan mencabut kartu tanda anggota (KTA) partai sekaligus meminta M untuk mengembalikan seluruh aset Partai X.

Salah satu daerah yang jelas-jelas terkena dampak dari konflik yaitunya kepengurusan X di Sumatera Barat, dualisme yang terjadi pada Partai X di Sumatera Barat, membuat 10 kader yang kini duduk di kursi dewan, harus kosong sesaat karna dipecat status keanggotaannya oleh ketua umum SO karna sebelumnya mereka mendukung untuk pemecatan SO yang di promotori oleh sekretaris jendral SS.

Peran penting partai politik dalam pemerintahan dewasa ini membuat Parpol juga tidak terlepas dari konflik kepentingan baik secara eksternal maupun secara internal (Ichlasul Amal, 1998 : 49). Disatu sisi konflik ini bisa saja menimbulkan situasi dinamis dalam tubuh Parpol itu sendiri namun di sisi lain Parpol dapat saja mengalami kemunduran akibat instabilitas dalam tubuh partainya.

Idealisme partai politik yang menghendaki partai berperan sebagai lokomotif dalam perubahan sosial politik ternyata dibelokkan menjadi sarana mencapai kekuasaan semata. Orientasi perjuangan partaipun tidak lagi mengakar pada rakyat, tetapi lebih menggantung pada kekuasaan.

Perebutan kekuasaan yang terjadi, seringkali individu-individu dalam Parpol memiliki kepentingan yang berbeda-beda, sehingga dimata publik partai politik memiliki citra yang kurang bagus (Romli, 2011 : 199-220) Bahkan tidak jarang muncul tensi (ketegangan) bahkan tahapan lebih lanjut dapat menjadi konflik internal Parpol.

Konflik yang terjadi di internal Partai X berujung pada pemecatan 10 orang anggota dewan yang berasal dari Partai X Sumbar. Sepuluh orang yang di pecat itu di antaranya M anggota dewan Sumatera Barat, Y, Z dan AO anggota dewan kota Padang, anggota dewan Pesisir Selatan, S dan E. Dari Kota Solok Selatan ME dan A, anggota dewan Dhamasraya dan yang terakhir anggota dewan Tanah Datar DY. Dari penjelasan atas fenomena yang terjadi maka peneliti menganggap bahwa konflik internal yang terjadi dalam tubuh Partai X belum selesai di tingkat Sumatera Barat karena setelah islahnya kepengurusan di tingkat pusat namun, masih terjadi pemecatan terhadap kader-kader kubu D di tingkat Sumatera Barat.

Ramlan Surbakti menegaskan bahwa konflik politik dirumuskan sebagai perbedaan pendapat, persaingan dan pertentangan di antara sejumlah individu, kelompok atau organisasi dalam upaya untuk mendapatkan dan mempertahankan sumber-sumber dari keputusan yang dibuat dan dilaksanakan pemerintah. (Ramlan Surbakti, 1992 : 151).

Pada dasarnya politik selalu mengandung konflik dan persaingan kepentingan. Suatu konflik biasanya berawal dari kontroversi yang muncul dalam berbagai peristiwa politik, dimana kontroversi tersebut diawali dengan hal-hal yang abstrak dan umum, kemudian bergerak dan berproses menjadi suatu konflik. (Imam Hidayat, 2009 : 104).

Konflik politik merupakan salah satu bentuk konflik sosial, dimana keduanya memiliki ciri-ciri mirip, hanya yang membedakan konflik sosial dan politik adalah kata politik yang membawa konotasi tertentu bagi istilah konflik politik, yakni mempunyai keterkaitan dengan negara atau pemerintah, para pejabat politik atau pemerintahan, dan kebijakan (Maswardi Rauf, 2001 : 19).

Menurut Surbakti konflik politik dikelompokkan menjadi dua tipe. Pertama, konflik positif yaitu konflik yang tak mengancam eksistensi sistem politik, yang biasanya disalurkan lewat mekanisme penyelesaian konflik yang disepakati bersama dengan konstitusi. Kedua konflik negatif ialah konflik yang dapat mengancam eksistensi sistem politik yang biasanya disalurkan melalui cara-cara non-konstitusional, seperti kudeta, separatism, terorisme, dan revolusi.

Tujuan dari penelitian adalah menganalisis faktor-faktor penyebab dan implikasi konflik politik yang terjadi di kepengurusan Partai X Sumatera Barat.

Untuk menganalisis faktor penyebab konflik dalam penelitian ini, peneliti menggunakan sumbangsi teori yang dikemukakan oleh Simon Fisher. Fisher menyumbangkan beberapa teori untuk menganalisis penyebab konflik di antaranya: Pertama, Teori hubungan masyarakat. Teori ini berbicara bahwa konflik disebabkan oleh polarisasi yang terus terjadi, ketidakpercayaan dan permusuhan diantara kelompok yang berbeda dalam suatu masyarakat. Teori ini memiliki sasaran untuk meningkatkan komunikasi dan saling pengertian antara kelompok-kelompok yang mengalami konflik.

Teori ini juga mengusahakan toleransi agar masyarakat lebih saling menerima keragaman didalamnya. Kedua yaitu teori

negosiasi prinsip. Teori ini menganggap bahwa konflik disebabkan oleh posisi-posisi yang tidak selaras dan perbedaan pandangan tentang konflik oleh pihak-pihak yang mengalami konflik (Meyer, 2012).

Sasaran yang dicapai teori ini yaitu membantu pihak-pihak yang mengalami konflik untuk memisahkan perasaan pribadi dengan berbagai masalah dan isu. Ketiga yaitu teori kebutuhan manusia berasumsi bahwa konflik yang berakar dalam disebabkan oleh kebutuhan dasar manusia-fisik, mental, dan sosial yang tidak terpenuhi atau dihalang-halangi, keamanan, identitas, pengakuan, partisipasi, dan otonomi sering merupakan inti pembicaraan. Keempat yaitu teori identitas, teori ini berasumsi bahwa konflik disebabkan karena identitas yang terancam, yang sering berakar pada hilangnya suatu penderitaan dimasa lalu yang tidak terselesaikan.

Sasaran dari teori ini yaitu melalui dialog antara pihak-pihak yang berkonflik diharapkan dapat mengidentifikasi ancaman-ancaman dan ketakutan yang mereka rasakan masing-masing dan membangun empati dan rekonsiliasi di antara mereka (Abdul Halim, 2014 : 26). Teori ini juga bertujuan untuk meningkatkan jalinan hubungan dan sikap jangka panjang diantara pihak pihak yang mengalami konflik.

## METODE

Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif. Penelitian ini dilakukan di sekretariat X Provinsi Sumatra Barat Versi VM, dan sekretariat X versi HM Provinsi Sumatera Barat.

Penelitian ini lebih difokuskan pada konflik politik di kepengurusan Partai X Sumatera Barat. Peran peneliti sebagai instrumen penelitian sehingga peneliti bisa mengolah informasi dengan melakukan wawancara untuk menjelaskan faktor-faktor penyebab konflik dan implikasi konflik yang terjadi di X Sumbar. Jadi peneliti merupakan key instrument dalam mengumpulkan data peneliti harus terjun sendiri kelapangan secara aktif.

Dalam penelitian ini peneliti juga berperan dalam menentukan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data

melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisa data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuan (Afrizal 2014 : 38).

Dalam pemilihan informan penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* agar diperoleh data yang tepat dari orang yang tepat pula. Informan yang diteliti memiliki beberapa kriteria yang ditentukan peneliti, hal ini diperlukan jika informan yang telah di pilih ternyata berhalangan atau tidak bisa diwawancarai akan diganti dengan informan lain yang memenuhi kriteria, sehingga penelitian dapat dilaksanakan dengan baik (Burhanuddin Bungin, 2011 : 57).

Dalam penelitian ini yang menjadi unit analisisnya adalah lembaga atau organisasi, alasan pemilihan ini karena konflik ini terjadi antara dua kubu atau kelompok yang mewakili kepentingan masing-masing. Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif. Data dalam penelitian ini terbagi atas data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan dengan wawancara dan dokumentasi. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik wawancara yang mendalam (*in-depth interview*). Wawancara mendalam adalah sebuah wawancara tidak terstruktur antara pewawancara dengan informan yang dilakukan berulang kali yang tidak berarti mengulang-ulang pertanyaan yang sama akan tetapi menanyakan hal yang berbeda dan mengklarifikasi informasi yang sudah didapat sebelumnya.

Untuk menguji keabsahan data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi sumber data. Teknik triangulasi berdasarkan sumber disini maksudnya adalah membandingkan dan mengecek ulang derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui orang-orang (sumber) yang berbeda.

Analisis data dalam penelitian ini akan menggunakan teknik analisis data deret waktu, perbandingan pola, pembuatan penjelasan, Analisis tersebut dengan cara membandingkan pola yang diprediksi (berdasarkan literatur) dengan pola yang ditemukan (empiris) pada kasus-kasus kemudian peneliti juga melakukan analisis penjelasan kasus dan kesimpulan berdasarkan analisis tersebut.

Dalam menganalisa penelitian ini menggunakan analisis etik dan emik. Data etik adalah pandangan informan terhadap hasil wawancara atau data yang didapat. Sedangkan emik adalah data yang didapat dalam wawancara mendalam dari informan, transkrip yang telah diseleksi dan dikualifikasi sesuai kebutuhan dan kemampuan penulis.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Kronologis Konflik

Awal mula gejala konflik yang terjadi dalam kepengurusan X dilatarbelakangi hilangnya rasa kepercayaan dalam kepengurusan Partai X terhadap pengurus (DPP) yang berdampak pada kepengurusan Sumatera Barat pasca pergantian kepemimpinan dari W ke SO.

Pergantian posisi W sebagai ketua umum yang telah diangkat menjadi Menteri yang mana pergantian ini sangat sesuai dengan komitmen politik Presiden.

Harapan dari mayoritas ketua se-Indonesia meminta M selaku wakil ketua umum Partai X untuk menggantikan posisi W sebagai ketua umum, maka dibangun komunikasi yang intens, baik dengan sesama ketua ataupun dengan M.

Melihat dinamika yang terjadi dalam tubuh kepengurusan terkait calon yang akan menggantikan dirinya, maka W mencoba mengakomodir kepentingan tersebut dengan membuat pertemuan tertutup dengan pimpinan seluruh Indonesia di kediaman pribadi milik W.

Dalam pertemuan tersebut beberapa pimpinan Partai X mempertanyakan keputusan W untuk memilih SO sebagai ketua umum partai. Dalam pertemuan yang dilakukan oleh W secara tertutup. Pertemuan ini hanya dihadiri oleh W selaku ketua umum dan seluruh ketua tanpa satu orangpun pengurus DPP.

Dalam konteks pertumbuhan partai politik mungkin yang disebut Afan Gaffar ada benarnya, bahwa suasana itu merefleksikan orientasi elit politik (Nurhasim, 2013 : 17-28). Maka dalam forum pertemuan tertutup ini peneliti menilai ada pemaksaan kehendak yang dilakukan oleh W terhadap mekanisme pemilihan ketua umum Partai X yang akan dilaksanakan dalam forum Munaslub.

Dalam proses terpilihnya SO sebagai ketua umum Partai X peneliti mendasarkan pada 2 asumsi modal yang dimiliki SO yaitu modal simbolik dan finansial.

Modal pertama, yaitu modal simbolik. Modal simbolik adalah jenis sumber daya yang dioptimalkan dalam meraih kekuasaan simbolik. Dengan jabatan tinggi di DPD RI dan MPR RI tentu dengan simbol jabatan tinggi lembaga tinggi negara DPD RI dan MPR RI, W tentu berfikir itu bisa mendongkrak elaktabilitas partai jika di pimpin ketua Dewan Perwakilan Daerah tersebut.

Kedua, modal yang dimiliki SO yaitu modal ekonomi. Modal ekonomi adalah sumber daya yang bisa menjadi sarana produksi dan sarana finansial. Modal ekonomi ini merupakan jenis modal yang mudah dikonversikan ke dalam bentuk-bentuk modal lainnya. Selain sebagai tokoh publik yang memiliki jabatan pimpinan lembaga tinggi negara. SO juga merupakan pebisnis sukses yang memiliki perusahaan dengan kekayaan mencapai USD 350 juta.

Pasca terlantik sebagai ketua umum Partai X SO mulai membuat kebijakan yang kontroversial yaitu dengan memasukkan anggota DPD RI dalam kepengurusan DPP dan, memecat beberapa ketua dan mengganti dengan teman sejawat SO. Selanjutnya melarang memasang foto W di setiap baliho yang akan dipasang termasuk foto di sekretariat maupun DPC seluruh Indonesia. Untuk aturan dalam pembuatan baliho cukup menempelkan foto SO selaku ketua umum, ketua ataupun ketua DPC.

Kebijakan ini menjadi awal mosi tidak percaya terhadap ketua umum. Pengurus kemudian menemui W untuk meminta solusi atas permasalahan yang terjadi dalam kepengurusan X, W memberikan rekomendasi untuk melaksanakan Munaslub sebagai forum legal dan konstitusional.

Forum ini dimaksudkan untuk membicarakan terkait mekanisme penyelesaian dalam persoalan ketidakpercayaan dalam kepengurusan ini. Perwakilan dewan pembina dan dewan kehormatan Partai X turut hadir dalam pleno yang diselenggarakan oleh sebagian besar ketua dan pengurus DPP.



Hasil rapat pleno menyetujui pemecatan SO sebagai ketua umum yang sah dan sudah ditandatangani sehari sebelumnya. Alasan utamanya, mosi tak percaya dari 27 dan 400 DPC yang meminta pergantian ketua umum. Pemecatan SO ini memunculkan dualisme kepemimpinan, karna pasca forum rapat pleno memecat SO sebagai ketua umum forum juga menunjuk wakil ketua umum D sebagai pelaksana tugas ketua umum (Plt). Sejak lahirnya keputusan pleno yang disepakati oleh sebagian besar pengurus dan DPP Partai X terkait pemecatan ketua umum SO. Semuanya praktis menciptakan kondisi ketergantungan dalam mendesign tatakepartaian internal yang sentralistik sekaligus memperkuat model *patron-client* yang sukar diputus. (Sutisna, 2015).

Keputusan ini malah menjadi awal mula perpecahan di tubuh kepengurusan X di tingkat pusat yang berimbas ketingkat daerah termasuk Sumatera Barat, karna bagaimanapun M termasuk barisan terdepan untuk menggulingkan kekuasaan SO.

#### B. Faktor-Faktor Penyebab Konflik

Temuan dari hasil penelitian tentang faktor-faktor penyebab konflik, diantaranya Pertama, teori hubungan masyarakat. Teori ini berbicara bahwa konflik disebabkan oleh polarisasi yang terus terjadi, bentuk ketidakpercayaan dan permusuhan diantara kelompok yang berbeda dalam suatu masyarakat.

Dalam hal pengelolaan sekretariat DPP partai, SO memulai membuat kebijakan yang menguntungkan pribadinya yaitu memindahkan lokasi sekretariat partai ke sebuah gedung mewah di kawasan Jakarta tapi sesudah dipindahkan malah disuruh untuk membayar sewa untuk sekretariat yang baru.

Namun ada yang membuat hati pengurus kecewa. Kekecewaan itu mul ketika mendengar kabar bahwa kantor sekretariat DPP saat ini tidak gratis namun disewa karna salah seorang staf perusahaan SO Goup datang untuk meminta sewa gedung kepada pengurus DPP.

Teori ini menganggap bahwa konflik disebabkan oleh posisi-posisi yang tidak selaras dan perbedaan pandangan tentang konflik oleh

pihak-pihak yang mengalami konflik. Pergantian ketua dan sekretaris X Sumatera Barat yang dilakukan SO membuat beberapa tokoh senior X Sumbar merasa tidak dihargai.

Dari penuturan yang disampaikan oleh sekretaris X Sumbar versi HM di bawah kepemimpinan D memang memiliki rasa solidaritas ditengah kemelut konflik politik yang mendera partainya. Negosiasi yang harusnya dilakukan oleh kedua belah pihak nyatanya tidak membuahkan hasil yang memuaskan sehingga banyak tokoh senior X Sumbar di bawah kepemimpinan M yang tidak mau masuk dalam kepengurusan VM.

Ketiga yaitu teori kebutuhan manusia berasumsi bahwa konflik yang berakar dalam disebabkan oleh kebutuhan dasar manusia-fisik, mental, dan sosial yang tidak terpenuhi atau dihalang-halangi, keamanan, identitas, pengakuan, partisipasi, dan otonomi sering merupakan inti pembicaraan.

Keempat yaitu teori identitas, teori ini berasumsi bahwa konflik disebabkan karena identitas yang terancam, yang sering berakar pada hilangnya suatu penderitaan dimasa lalu yang tidak terselesaikan.

Konflik politik yang terjadi di Partai X akan berimbas pada elektabilitas partai. Dalam proses pemilihan SO sebagai ketua umum Partai X secara aklamasi ada proses instruksi yang dilakukan oleh W kepada seluruh ketua, walaupun para Ketua menginginkan M sebagai ketua umum.

#### C. Implikasi Konflik

Konflik politik di X memiliki implikasi terhadap pergantian ketua serta pemecatan 10 anggota dewan X Sumatera Barat dari kubu D, sehingga kader yang dipecat memilih untuk berpindah partai. Namun konflik ini, juga berdampak baik dalam pengembangan struktur organisasi partai sampai tingkat anak ranting.

Selain itu, pengurus yang baru mampu melaksanakan agenda kaderisasi pratama yang belum pernah dilakukan. Konflik politik Partai X adalah cerminan bagaimana rusaknya sub sistem dalam kepartaian di Indonesia, karna partai sudah berevolusi menjadi lembaga ekonomi

yang syarat akan kepentingan dan transaksi modal finansial.

Menurut Ramlan Surbakti konflik politik dikelompokkan menjadi dua tipe yaitu: konflik positif yaitu konflik yang tak mengancam eksistensi sistem politik, yang biasanya disalurkan lewat mekanisme penyelesaian konflik yang disepakati bersama dengan konstitusi.

Mekanisme yang dimaksud ialah lembaga-lembaga demokrasi, seperti partai politik, badan-badan perwakilan rakyat, pengadilan, pemerintah, pers, dan forum-forum terbuka yang lain. Tuntutan akan perubahan yang diajukan oleh sejumlah kelompok masyarakat melalui lembaga-lembaga itu merupakan contoh konflik positif.

Pada awalnya peneliti berasumsi konflik politik yang terjadi dalam kepartaian dapat dikelompok sebagai konflik positif yaitu konflik tidak mengancam eksistensi sistem politik. Karna kalau kita menarik konflik yang terjadi di X dengan tarikan yang pendek maka konflik ini hanya kita maknai sebagai konflik positif tapi kalau kita tarik dengan tarikan yang panjang maka kita bisa memahami bahwa konflik yang terjadi bukanlah kesalahan dari X.

Ditengah kepengurusan W ternyata tidak mampu mengendalikan SO dalam hal kewenangan strategis partai. Manuver yang dibuat SO menjadi bumerang bagi W. Mantan pendiri sekaligus ketua umum Partai X menjadi masuk dalam pusaran kekecewaan para pengurus karna inkonsistensinya dalam menyatakan dukungan terhadap salah satu kubu.

#### D. Konflik Politik Karna Perbedaan Kepentingan

Konflik yang terjadi di kepengurusan X Sumbar di akibatkan oleh benturan kepentingan antara dua sumber kekuatan yaitu kubu VM mendapat representatif dukungan dari SO sedangkan M mendapat dukungan dari SS. Benturan kepentingan dua sumber kekuatan ini membuat permasalahan pengurus menjadi semakin memanas akibat sikap masing-masing pengurus tidak mau menurunkan ego untuk kebaikan partai. Sebagai ketua X Sumbar VM sudah mencoba mengajak kubu HM untuk

bergabung dalam kepengurusan X Sumbar di bawah kepemimpinannya, namun selalu ditolak oleh HM dan rekan-rekan pengurus versi D.

Hal yang berbeda dialami oleh M, mantan ketua X Sumbar mengikuti jejak Sekretaris Jenderal mengikuti SS pindah ke Partai Z dengan tetap mecalonkan diri pada pemilihan legislatif 2019 pasca dipecat status keanggotaan oleh SO selaku ketua umum.

Sedangkan HM beserta pengurus versi D masih berusaha lewat jalur persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara karna menganggap KS yang diterbitkan Kemenkumham cacat hukum.

Sampai saat ini dua kepengurusan X Sumatera Barat masih berjalan dengan lokasi sekretariat yang berbeda dan aset yang berbeda, tapi yang paling penting dua kepengurusan ini mendapatkan legalitas yang berasal dari dua sumber kekuatan yang berbeda.

Jadi selama sumber kekuatan mereka belum berdamai, maka pengurus X Sumbar juga tidak akan bisa berdamai secara kelembagaan. Konflik Partai X menjelaskan bagaimana bobroknya sistem manjerial partai dalam menjalankan fungsi sebagai sarana pengatur konflik.

Faksi-faksi dalam internal kepengurusan harus mampu dicairkan oleh SO selaku ketua. Kondisi kepartaian yang rusak juga akan berimbas pada kualitas kader yang menjadi legislator dari partai tersebut.

## KESIMPULAN

Konflik politik berarti pertentangan kepentingan politik untuk memperoleh kekuasaan politik. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan definisi konflik politik dari Ramlan Surbakti yang mendefenisikan konflik politik sebagai perbedaan pendapat, persaingan dan pertentangan di antara sejumlah individu, kelompok atau organisasi dalam upaya untuk mendapatkan dan mempertahankan sumber-sumber dari keputusan yang dibuat dan dilaksanakan pemerintah.

Peneliti menggunakan teori faktor penyebab konflik dari Simon Fisher, hasil dari temuan peneliti menyimpulkan ada beberapa faktor penyebab terjadinya konflik politik dalam kepengurusan X Sumatera Barat. Pertama,

adanya rasa ketidakpercayaan pengurus X Sumatera Barat terhadap ketua umum SO. Kedua, adanya rasa kekecewaan ketua X W yang tidak mampu mengambil sikap yang bijak dalam konflik yang terjadi di kepengurusan X. Ketiga, kurangnya rasa saling menghargai antara tokoh senior dan junior X di Sumatera Barat. Keempat, Perbedaan pandangan dalam pengelolaan Partai antara kubu SO dengan kubu SS. Kelima, masuknya gerbong UA melalui Perhimpunan Pergerakan Indonesia dan beberapa anggota Dewan Perwakilan Daerah dalam kepengurusan X baik di tingkat DPP maupun di tingkat DPC.

Peneliti juga menganalisis implikasi dari konflik politik yang terjadi di X Sumatera Barat dan menemukan beberapa dampak yaitu pertama, dipecatnya 10 anggota dewan dengan rincian satu orang anggota dewan provinsi dan 9 orang anggota dewan Kabupaten/Kota. Kedua, rusaknya hubungan sosial sesama pengurus X Sumbar. Ketiga adanya pembaharuan dalam struktur kepengurusan partai sampai ke tingkat anak ranting. Kemudian, adanya terobosan dalam hal kaderisasi dalam kepartaian X dengan dijalankannya latihan kader pratama. Konflik politik yang terjadi dalam Partai X termasuk dalam bentuk konflik positif karena tidak mengancam eksistensi sistem politik karena dapat diselesaikan lewat pengadilan pemerintah. Walaupun dalam keputusan yang dikeluarkan oleh Kemenkumham sangat kental unsur politiknya.

Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa konflik yang terjadi pada kepengurusan X Sumatera Barat disebabkan oleh benturan kepentingan sumber kewenangan antara pihak VM yang mendapatkan dukungan dari SO dengan kubu HM yang mendapat dukungan dari D.

Konflik semakin diperuncing dengan ego senioritas M dan HM memandang VM sebagai tokoh muda yang belum berpengalaman dalam dunia kepartaian. Konflik ini tentu berimplikasi pada kepercayaan masyarakat terhadap Partai X terutama pengurus X Sumbar.

Penelitian ini masih banyak kekurangan dalam unsur pembahasan tentang bagaimana kondisi dan pengelolaan partai saat ini. Partai

X sebagai salah satu partai nasionalis harusnya mulai berbenah dalam hal pengelolaan organisasi.

Dalam hal ini peneliti akan memberikan beberapa rekomendasi baik untuk Parpol secara umum maupun Partai X secara terkusus. Pertama, Parpol harusnya kembali memperkuat basis ideologi dengan menjalankan agenda kaderisasi. Kedua, Parpol harus memiliki mahkamah konstitusi partai sebagai lembaga yang akan menyelesaikan konflik internal partai. Ketiga, Parpol harusnya membuka ruang dialektika untuk mendapatkan terobosan dalam menjawab tantangan zaman. Keempat, kepemimpinan partai tidak lagi bersifat oligarki.

## REFERENSI

- Afrizal. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif-Sebuah Upaya Mendukung Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Amal, I. (1998). *Teori-Teori Mutakhir Partai Politik*. Jakarta: Tiara Wacana.
- Budiardjo, M. (2009). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Budiardjo, M. (1998). *Partisipasi dan Partai Politik*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Bungin, B. (2011). *Analisa Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Fisher, S., et.al. (2001). *Mengelola konflik-Keterampilan & Strategi*. The British Council.
- Halim, A. (2014). *Politik Lokal; Pola, Aktor & Alur Dramatisasinya*. Yogyakarta: LP2B.
- Hidayat, I. (2009). *Teori-teori Politik*. Malang: Setara Press.
- Huntington, P. S. (1983). *Tertib Politik Masyarakat Yang Sedang Berubah*. Jakarta: CV Rajawali.
- Marijan, K. (2010). *Sistem Politik Indonesia : Konsolidasi Demokrasi Pasca Orde Baru*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Noor, F. (2015). *Perpecahan dan Soliditas Partai di Indonesia kasus PKB dan PKS di dekade awal Reformasi*. Jakarta: LIPI Press.
- Rauf, M. (2001). *Konsensus dan Konflik Politik*. Jakarta: DIKTI.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Subakti, R. (1992). *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT Grasindo.



*Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Tim Pustaka Phoenix.

#### Jurnal dan Penelitian:

- Bakar, A. (2013). Politik dinasti dan pelembagaan partai politik. *Al-Daulah*, 1(2), 105–119.
- Bambang. (2010). *Konflik Internal partai kebangkitan bangsa di Kabupaten Karawang: Sumber dan Dampak konflik pada pemilu 2009*. (Skripsi, Jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik). Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Diana, Yunica, & Kurniawan R. C. (2016). Konflik Internal Partai Nasdem dan Pemilihan Legislatif 2014. *Jurnal Wacana Politik–Jurnal Ilmiah Departemen Ilmu Politik*, 1(1).
- (2006). *Jurnal Konstitusi*, 3(4). Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta.
- Krisdinanto, & Nanang. (2014). “Pierre Bourdieu, Sang Juru Damai”. *Jurnal KANAL*, 2(2).
- Meyer, T. (2012). *Peran Partai Politik Dalam Sebuah Sistem Demokrasi: Sembilan Tesis* (Ketiga). Jakarta: Kantor Perwakilan Indonesia.
- Mulyawan, A. (2017). *Konflik Internal Partai Golkar Pasca Pemilihan Umum Tahun 2014*. (Skripsi, Jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik). Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Noor, F. (2016). Oposisi Dalam Kehidupan Demokrasi: Arti Penting Keberadaan Oposisi Sebagai Bagian Penguatan Demokrasi di Indonesia. *Masyarakat Indonesia*, 42(1), 1–17.
- Nurhasim, M. (2013). Di Era Reformasi the Failure of Political Parties Modernization in the Re F Orm Era. *Jurnal Penelitian Politik*, 10(1), 17–28.
- Romli, L. (2011). Reformasi Partai Politik dan Pistem Kepartaian di Indonesia. *Politica*, 2(2), 199–220.
- Said, R. (2014). *Persepsi Masyarakat Mengenai Partai Politik Di Kelurahan Penyengat Kota Tanjung pinang*. (Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Maritim Raja Haji Tanjung pinang).

- Sarbaini, Harpani, M., & Zainal, (2015). Persepsi Masyarakat Terhadap Partai Politik Di Desa Terantang Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*. Universitas Lambung Mangkurat.
- Sitompul, C. (2010). Konflik Internal Partai Sebagai Salah Satu Penyebab Kompleksitas Sistem Multipartai Di Indonesia. *Jurnal Legislasi*, 5(1).
- Sutisna, A. (2015). Devolusi Kekuasaan Parpol di Indonesia. *Jurnal Administrasi Negara*, 3(1), 1–8.

#### Peraturan Perundang-undangan:

- Undang-Undang (UU) Nomor 10/2008 tentang Pemilu Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (pemilu legislatif) serta UU Nomor 2/2008 tentang Partai Politik
- Undang-Undang (UU) Nomor 02/2011 tentang Partai Politik

#### Sumber Internet dan Situs:

- Anggaran dasar dan anggaran rumat tangga partai X*. (2020, Oktober 19). Retrieved from [partaix.or.id:partaix.or.id/AD-ART.html](http://partaix.or.id:partaix.or.id/AD-ART.html)
- Dipecat, Agung Laksono Masih Bisa Jadi Ketua Umum*. (2020, Oktober 21). Diakses dari [tempo.co.id](http://tempo.co.id)
- Konflik Internal Sebagai Ujian Solidaritas Golkar. blm* 3. (2020, Oktober 20). Diakses dari [kompas.co.id](http://kompas.co.id)
- Struktur kepengurusan dibawah pimpinan SO*. (2020, Oktober 18). Diakses dari [partaix.or.id:partaix.or.id/profil/detil/2120/strukturorganisasi](http://partaix.or.id:partaix.or.id/profil/detil/2120/strukturorganisasi)